

Judul : Cegah kerugian peserta, Komisi IX minta BPJS sinkronkan data PBI
Tanggal : Senin, 23 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Kerugian Peserta

Komisi IX Minta BPJS Sinkronkan Data PBI

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) agar tepat sasaran. Pasalnya, perbedaan data berdampak pada penonaktifan peserta yang seharusnya masih berhak menerima bantuan pemerintah.

Nihayatul menyebut, persoalan utama terletak pada ketidak-sinkronan basis data sosial yang digunakan dalam penetapan penerima PBI. Kondisi itu menyebabkan sebagian masyarakat miskin kehilangan perlindungan kesehatan, sementara kelompok yang tidak berhak masih tercatat sebagai penerima.

"Kita harus memastikan semua data itu dalam posisi benar. Dan yang penting adalah masyarakat yang diputus kepesertaannya itu tersosialisasikan dengan baik," ujar Nihayatul dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Dia menjelaskan, hasil rapat gabungan Komisi IX sebelumnya telah menyepakati masa evaluasi selama tiga bulan untuk memastikan seluruh data berada dalam kondisi akurat. Waktu itu

juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terdampak.

Berdasarkan data yang dibahas, Nihayatul mengungkapkan, masih banyak masyarakat dalam kategori desil 1 sampai desil 5 yang belum terdaftar sebagai peserta PBI. Sedangkan kelompok desil 6 hingga desil 10 bahkan non-desil justru masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Hal itu menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem pendataan yang perlu segera dikaji secara menyeluruh. Idealnya, kelompok yang tidak memenuhi kriteria harus dinonaktifkan, bukan masyarakat miskin yang memang berhak menerima perlindungan negara.

"Nah, ini yang perlu kita kaji ulang. Kesalahannya di mana, sistemnya seperti apa, atau memang kita perlu memperbaiki data-data lainnya supaya lebih akurat," katanya.

Karena itu, pihaknya meminta seluruh pemangku kepentingan terkait duduk bersama melakukan pembenahan data secara menyeluruh. Proses itu harus melibatkan Badan Pusat Statis-



Nihayatul Wafiroh

tik, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Kesehatan, agar pendataan berjalan seragam.

"Kami berharap dalam tiga bulan seluruh data sudah sinkron. Dan masyarakat yang berhak menerima PBI kembali mendapatkan hak perlindungan kesehatannya," ucap politikus PKB itu.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi IX DPR Ravindra Air-langga mengingatkan penting-nya perlindungan sosial selama

proses pemutakhiran data berlangsung. Sinkronisasi dan pembaruan data tidak boleh langsung berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan masyarakat rentan.

"BPJS harus diberi waktu mempersiapkan mekanisme transisi sosial yang memadai, seperti sosialisasi tiga bulan sebelum perubahan data dan masa tenggang tiga bulan setelahnya," ujar Ravindra.

Dia menjelaskan, masa transisi itu penting agar kepesertaan PBI tetap aktif meskipun terjadi perubahan data administratif. Dengan demikian, masyarakat tidak langsung kehilangan status kepesertaan akibat proses pemutakhiran sistem. Selanjutnya, pemutakhiran DTSEN harus diikuti dengan skema transisi yang jelas, terukur, dan mudah dipahami masyarakat.

"Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, kebijakan pembaruan data berpotensi menimbulkan keresahan sosial," ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Selain sosialisasi, Ravindra juga menyoroti pendampingan reaktivasi kepesertaan bagi

masyarakat rentan. Kolaborasi lintas wilayah hingga tingkat RT dan RW diperlukan agar proses administratif tidak jadi hambatan baru. Perubahan data tidak boleh berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, dia meminta penguatan tata kelola pembiayaan untuk menjaga stabilitas program JKN. BPJS Kesehatan didorong menurunkan biaya per anggota per bulan tanpa menaikkan premi peserta. Selain itu, alternatif pendanaan seperti mekanisme pembayaran fleksibel, cukai kesehatan, dan dana abadi juga perlu dipertimbangkan.

Tak hanya itu, Ravindra menilai, ketimpangan beban layanan yang masih bertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan perlu segera dibenahi. Penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dinilai menjadi kunci pengendalian biaya jangka panjang.

"Peningkatan pemanfaatan FKTP penting agar penyakit bisa ditangani sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi penyakit katastropik," pungkasnya. ■ PYB